

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata rasio kemandirian Kabupaten Gorontalo masih sangat rendah atau masih kurang baik. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo masih kurang baik dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Rata-rata rasio Efektivitas Kabupaten Gorontalo sebesar 130,647% yang berarti bahwa efektivitas PAD di Kabupaten Gorontalo telah dilakukan dengan efektif sehingga apa yang dianggarkan dapat tercapai dengan baik.
3. Rata-rata rasio Pertumbuhan Kabupaten Gorontalo sebesar 19,985% yang berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gorontalo terus mengalami peningkatan dari tahun 2010-2014
4. Struktur penerimaan PAD meliputi 4 penjabaran berikut:
 - a. Rata-rata rasio Kontribusi pajak daerah di kabupaten Gorontalo sebesar 13,125% yang terletak pada kriteria yang kurang. Artinya pajak daerah belum mampu untuk memberikan sumbangan besar bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo

- b. Rata-rata rasio Kontribusi retribusi daerah di kabupaten Gorontalo sebesar 10,995% yang terletak pada kriteria yang kurang. Artinya retribusi daerah belum mampu untuk memberikan sumbangan besar bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo.
 - c. Rata-rata rasio Kontribusi Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan di Kabupaten Gorontalo sebesar 6,075% yang terletak pada kriteria yang sangat kurang.
 - d. Rata-rata rasio lain-lain PAD yang sah di Kabupaten Gorontalo sebesar 69,805% yang terletak pada kriteria yang sangat besar. Artinya sumber PAD Kabupaten Gorontalo merupakan hasil yang diperoleh dari lain-lain PAD yang sah.
5. Rata-rata rasio Otonomi Fiskal Kabupaten Gorontalo sebesar 7,486% yang berarti bahwa pemerintah Kabupaten Gorontalo belum mampu untuk menjadi sebuah kabupaten yang memiliki derajat otonomi fiskal yang baik.
6. Rata-rata rasio Kemampuan PAD Kabupaten Gorontalo dalam menutupi belanja rutin sebesar 9,500% yang berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah belum mampu untuk menutupi belanja operasional pemerintahan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan peneliti sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo yakni:

1. Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk dapat terus meningkatkan PAD melalui berbagai cara diantaranya intensifikasi dan ekstensifikasi.
2. Melakukan langkah intensifikasi yakni dengan cara membina para petugas pajak dan memberikan arahan untuk tidak menggunakan pajak terutama dari pajak Galian C, membuat aturan perundang-undangan (PERDA) yang berkaitan dengan pajak daerah serta retribusi daerah. kemudian mengalokasikan lebih banyak belanja modal dengan agar pendapatan asli daerah meningkat.
3. Melakukan ekstensifikasi yaitu mencari objek baru yang dapat dikenakan Pajak daerah, yang objek-objek ini pada waktu yang lalu tidak dikenakan pajak. Cara ini pula dapat ditempuh dengan melakukan sosialisasi dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak daerah dan membayar retribusi daerah sesuai pada petugas yang dipercayakan pemerintah dalam mengumpulkan retribusi daerah tersebut.
4. Pemerintah kabupaten gorontalo sebaiknya melakukan pembenahan mengenai alokasi belanja modal sehingga fasilitas publik semakin memadai sehingga implikasinya pada pendapatan asli daerah yang semakin besar. Kemudian dalam penentuan anggaran sebaiknya tidak terlalu besar dalam menentukan anggaran agar mudah dicapai dan walaupun telah tercapai dengan persentase yang besar maka terus ditingkatkan target tersebut agar pertumbuhan PAD menjadi lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2002.** *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah.*
Yogyakarta : C.V. Andi Offset
- Mulyana, Dedy. 2004.** *Metode Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya.* Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sari, Diana. 2013.** *Konsep Dasar Perpajakan.* Bandung : PT Refika Aditama
- Soleh. Rochmansjah. 2010.** *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.*
Bandung : Fokusmedia
- Sugiyono. 2013.** *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.
- Agustina, Oesi. 2013.** *Jurnal Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Dan Tingkat Kemandirian Di Era Otonomi Daerah : Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011).* Malang : Universitas Brawijaya
- Fauznyi, Wulan. 2013.** *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak. Bukan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Sampai 2011.* Jakarta : Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Masdjojo. Sukartono. 2009.** *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah Tahun 2006 – 2008.* Tema Vol 6 Edisi 1, Maret 2009 hal 32 -50
- Syahril. 2007.** *Jurnal Ekonis, Vol. 4, No. 2, Agustus 2007 : Peranan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pada Dispenda Kabupaten Aceh Utara)*
- Anita W, 2001.** <http://referensiakuntansi.blogspot.com/2012/11/keuangan-daerah.html/diakses-06-07-2015/pukul-19:43>
- Bird. Vaillancourt. 2000.** *Landasan Teori : Derajat Otonomi Fiskal.*
<http://2frameit.blogspot.com/2011/07/landasan-teori-derajat-otonomi-fiskal.html/diakses-20-06-2015/pukul-15:36>
- Kuncoro. 1995.** http://jurnal.pnl.ac.id/wp-content/plugins/Flutter/files_flutter/1395464387JurnalPerananPADdalamPelaksanaanOtonomi.pdf./diakses-16-07-2015/pukul-19-01

Radianto. 1997. *Landasan Teori : Derajat Otonomi Fiskal.*
<http://2frameit.blogspot.com/2011/07/landasan-teori-derajat-otonomi-fiskal.html/diakses-20-06-2015/pukul-15:36>

Sidik. 2000. *Landasan Teori : Derajat Otonomi Fiskal.*
<http://2frameit.blogspot.com/2011/07/landasan-teori-derajat-otonomi-fiskal.html/diakses-20-06-2015/pukul-15:36>

Tumilar. 1997. <http://referensiakuntansi.blogspot.com/2012/11/keuangan-daerah.html/diakses-06-07-2015/pukul-19:43>

Husain Walidun. 2013. *The Influence Of Local Taxes And Levies Towards Expenditure Allocation In Kota Gorontalo, Indonesia*

Ritonga Dkk. 2013. *Factors Affecting Financial Condition Of Local Government In Indonesia*

Jackrine Nsemerirwe. 2012. *Tax Evasion And Revenue Collection Performance In Local Governments In Uganda. A Case Study Of Kampala City Council.(KCC)*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah